

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN WARGA
BINAAN KEMASYARAKATAN PADA MASA COVID
19 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Jonariko Simamora
170710015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN WARGA
BINAAN KEMASYARAKATAN PADA MASA COVID
19 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Jonariko Simamora
170710015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Jonariko Simamora
Npm : 170710015
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Tinjauan Yuridis Pembebasan Warga Binaan Kemasyarakatan Pada Masa Covid 19 Di Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Januari 2021



Jonariko Simamora
170710015

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN WARGA
BINAAN KEMASYARAKATAN PADA MASA COVID
19 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Jonariko Simamora
170710015**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Januari 2021



**Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Akhir tahun 2019 muncul suatu wabah *corona virus disease* atau covid-19 menjadi berita mancanegara dan juga nasional. Tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan saja, namun juga merambah keseluruh sendi kehidupan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus ini didalam Lapas kemudian Menkumham membuat kebijakan No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *ratio legis* Menteri Hukum dan Ham dalam mengeluarkan kebijakan No 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona ditengah wabah Covid-19 saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah *Ratio Legis* Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan merupakan suatu langkah yang *revolusioner* namun bersifat sementara, kebijakan ini hanya berlaku selama masa pandemi covid-19 saja. Lapas di kota batam sudah menerapkan kebijakan ini sehingga 160 orang warga binaan mendapat pembebasan bersyarat melalui program asimilasi dan intergrasi tersebut, namun setelah pembebasan narapidana tersebut dilakukan tiga (3) orang dari 160 orang tersebut kembali ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana kembali.

Kata kunci: covid-19, *ratio legis*, narapidana

ABSTRACT

At the end of 2019, an outbreak of the corona virus disease or covid-19 appeared to be international and national news. It is not only felt in the health sector, but also in all areas of life. In an effort to prevent and control the spread of this virus in prisons, the Minister of Law and Human Rights made policy No.10 of 2020 concerning the Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19. The purpose of this study is to determine the ratio legis of the Minister of Law and Human Rights in issuing policy No. 10 of 2020 and Decree of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the Expenditure and Release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration In the Context of Preventing and Controlling the Spread of Corona in the current Covid-19 outbreak. This study uses a normative juridical research method. The result of this research is that the parole Legis Ratio given to assisted residents is a revolutionary but temporary step, this policy only applies during the Covid-19 pandemic period. The prison in Batam city has implemented this policy so that 160 inmates receive conditional release through the assimilation and integration program, but after the release of the prisoners, three (3) of the 160 people were arrested again by the police for committing criminal acts again.

Keywords: covid-19, ratio legis, prisoner

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (SI) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Akademik pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Orang tua dan Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang saling memberi dukungan dan saran untuk mensukseskan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 28 Januari 2021



Jonariko Simamora

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	16
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	16
2.1.2 Teori kebijakan	18
2.2 Lembaga Pemasyarakatan	20
2.2.1 Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana	22
2.2.2 Hak-Hak Narapidana	22
2.2.3 Pembebasan Bersyarat	23
2.3 Kerangka Yuridis	24
2.3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995	24
2.3.2 Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999	25
2.3.3 Permenkumham No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham No 3 Tahun 2018	26
2.3.4 Permenkumham No 10 Tahun 2020	27
2.4 Kerangka Pemikiran	28
2.5 Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Sifat Penelitian	34
3.3 Jenis Data	35
3.4 Alat Pengumpulan Data	35
3.5 Metode Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	37

4.1.1 <i>Ratio Legis</i> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mengeluarkan Peraturan Menteri No 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-19.PK.01.04.04 di Tengah Wabah Covid-19	37
4.1.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasarakatan Masa Covid-19	42
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 <i>Ratio Legis</i> Menteri Hukum dan HAM Mengeluarkan Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 di Tengah Wabah Covid-19	48
4.2.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasarakatan Masa Covid-19	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Sumber Database Pemasyarakatan (SDP)	52